



PERUBAHAN RENCANA KERJA (R E N J A) TAHUN 2022



INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Jl. Pelabuhan – Kuala Tungkal
Email: inspektorattanjabbarat@gmail.com



KATA PENGANTAR

Puji serta syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT bahwa Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 telah selesai disusun yang merupakan amanat undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Pasal 21 ayat 3 menyebutkan bahwa : "Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Renja-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4)".

Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan dokumen perencanaan yang bersifat teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis dari Renstra Perubahan Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam aspek perencanaan pembangunan daerah, yang memuat Kebijakan, Program-Program dan Kegiatan indikatif Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama sisa tahun berjalan sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat.

Tersusunnya Perubahan Rencana Kerja ini tidak terlepas dari partisipasi semua pihak yang ada di Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat, besar harapan kami agar PERUBAHAN RENJA ini dapat bermanfaat, khususnya bagi Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan yang memerlukannya, untuk dijadikan bahan pertimbangan bagi penentu kebijakan serta selalu dalam lindungan Allah SWT, aamiin.

Kuala Tungkal, Juni 2022

INSPEKTUR KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



Des. ENCEP JARKASIH

Pembina Utama Muda

NIP. 19701201 199009

1.1 LATAR BELAKANG

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini berfungsi sebagai acuan kerja bagi pelaksanaan kegiatan pada tahun bersangkutan. Sebagai dokumen rencana perubahan tahunan, Rencana Kerja perubahan ini mempunyai arti yang strategis dalam mendukung tujuan Inspektorat mengingat bahwa :

- a. Perubahan Rencana Kerja merupakan dokumen yang secara substansial penerjemah dari visi, misi, dan program PD yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) perubahan.
- b. Perubahan Rencana Kerja merupakan salah satu instrumen untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2022 yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana capaian dan realisasi kinerja Perangkat Daerah serta capaian dan realisasi Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang telah tercapai.

Penyusunan Perubahan RENJA berpedoman pada Renstra Perubahan Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan mengacu pada rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Perubahan. Penyusunan RENJA bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD. Rencana Kerja Perubahan Inspektorat merupakan bagian yang utuh dari rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana strategis (RENSTRA) Perubahan Inspektorat. Keduanya merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah dan peraturan menteri dalam negeri nomor 28 tahun 2009 tentang perubahan atas peraturan

menteri dalam negeri nomor 23 tahun 2007 tentang pedoman tata cara pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dengan demikian program dan kegiatan pembangunan yang ada pada dokumen perencanaan diatur secara rinci dalam Perubahan Rencana Kerja (RENJA) .

Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 memuat rumusan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang dilengkapi dengan dana indikatif serta sumber dananya.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar hukum yang melatarbelakangi penyusunan Perubahan RENJA Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat Dilingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6);
7. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Serta Uraian Tugas Jabatan pada Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022, bertujuan untuk menunjukkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dari berbagai kegiatan, serta mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya pembangunan daerah.

Perubahan Rencana Kerja disusun sebagai pedoman bagi :

1. Pelaksanaan program dan kegiatan yang ada di Inspektorat;
2. Penyusunan kebijakan anggaran, program dan kegiatan Tahun 2022

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2022 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA INSPEKTORAT SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja inspektorat Sampai Dengan Triwulan II
- 2.2. Analisis kinerja pelayanan inspektorat kabupaten Tanjung Jabung Barat
- 2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi inspektorat kabupaten Tanjung Jabung Barat

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Tujuan dan Sasaran
- 3.2. Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja Inspektorat Tahun 2022
- 3.3. Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB IV PENUTUP

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan. Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri merupakan keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Sedangkan Laporan Keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban keuangan yang berbentuk laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Hasil evaluasi periode pelaksanaan triwulan II tahun 2022 Renja Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut ;

Formulir E.81

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota
Renja Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Periode Pelaksanaan : Januari s/d Mei 2022

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2022 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan anggaran Renja Perangkat daerah tahun berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun...)	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021 (%)		unit Perangkat daerah yang bertanggung Jawab		
										I		II		III		IV								
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 + 13/5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
01	Meningkatnya pelayanan administratif perkantoran	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100	12.285.277.951	100	7.342.788.648	100	12.285.277.951	11	1.038.592.521	-	487.028.469	-	0	-	-	11	1.575.560.990	111	8.888.349.638	111%	72,19%	Inspektorat
2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kelengkapan dokumen perencanaan	12	12.350.000	12	12.300.000	12	12.350.000	3	3.200.000	-	1475.000	-	0	-	-	3	4.675.000	15	16.975.000	125%	137,45%	Inspektorat

		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	5		5		5		3										160%	137,45%	Inspektorat	
					12.350.000	12.300.000	12.350.000	3.200.000	1.475.000	-	-	0	0	3	4.675.000	8	16.975.000						
2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan administrasi keuangan kantor	12		12		12		3										125%	96,65%	Inspektorat	
					4.269.230.838	4.071.098.665	4.275.230.838	24.760.000	30.560.000	-	-	0	-	3	55.320.000	15	4.126.418.665						

		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan gaji/tunjangan																	#DIV/0!	#DIV/0!	Inspektorat	
												0	0	-	-	0	-	0					
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pembayaran honor pengadministrasi keuangan dan Jumlah pengadministrasi keuangan	12		12		12		3										125%	39,56%	Inspektorat	
					183.000.000	17.080.000	183.000.000	24.760.000	30.560.000	-	-	0	0	3	55.320.000	15	72.400.000						
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase APIP yang mengikuti Diklat/ JFA dan Bimtek	12		12		12												125%	46,84%	Inspektorat	
					332.848.456	136.698.600	332.848.456	19.200.000	0	-	-	0	-	3	19.200.000	15	155.898.600						

		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas harian (PDH)	48	46	48	48	48	19.200.000	-	0	-	0	0	48	19.200.000	94	36.800.000	196%	191,67%	Inspektorat
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah APIP yang bersertifikasi sesuai dengan Jenjang Jabatannya	25	25	25	-	0	33.648.466	88.590.000	0	-	0	-	25	88.590.000	207.688.600	100%	66,22%	Inspektorat	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	12	12	12	3	4.724.197.596	4.727.744.297	0	-	-	0	3	4.724.197.596	2.670.243.549	125%	56,48%	Inspektorat		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya kebutuhan penerangan kantor	12	12	12	3	2.097.490	8.504.777	2.097.490	-	-	0	3	4.194.980	12.534.607	125%	147,38%	Inspektorat		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	12	12	12	3	21.305.758	94.221.756	6.987.786	-	-	0	3	28.293.544	122.483.498	125%	129,99%	Inspektorat		

		Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya makan dan minum untuk tamu, acara rapat dan kegiatan		12	12	12	12	3	4.399.000	-	0	-	0	3	4.399.000	15	23.548.100	125%	31,63%	Inspektorat
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya kebutuhan bahan cetak dan penggandaan	12	12	12	12	3	5.550.200	-	0	-	0	3	7.975.200	15	27.792.200	125%	88,76%	Inspektorat
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan, publikasi dan informasi pengawasan	12	12	12	12	3	1.050.000	-	0	-	0	3	1.710.000	15	6.130.000	125%	63,85%	Inspektorat
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dengan instansi lain di luar daerah	12	12	12	12	3	389.795.148	-	0	-	0	3	678.214.188	15	2.778.374.460	125%	61,61%	Inspektorat
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelayanan administrasi perkantoran							-	0	-	0	3	0	15	0	#DIV/0!	#DIV/0!	Inspektorat
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas roda empat dan roda dua							-	0	-	0	-	0	-	0	#DIV/0!	#DIV/0!	Inspektorat

		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pembelian Peralatan Gedung Kantor								-		-	0		0	-	0	-	0	#DIV/0!	#DIV/0!	Inspektorat
		Pengadaan Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	Persentase peningkatan pelayanan administrasi perkantoran (penambahan gedung baru)								-		-	0		0	-	0	-	0	#DIV/0!	#DIV/0!	Inspektorat

		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	12	12	101.757.750	12	182.196.763	3	169.939.500	24.992.204	-		-	0		0	3	24.992.204	15	157.128.997	125%	154,41%	Inspektorat
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat menyurat yang diadministrasikan dan Tersedianya sistem informasi surat menyurat berbasis Web	12	12	2.700.000	12	2.700.000	3	2.700.000	500.000	-		-	0		0	3	1.200.000	15	3.900.000	125%	144,44%	Inspektorat
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya pembayaran listrik, telepon dan air	12	12	98.989.500	12	63.166.763	3	98.989.500	15.382.204	-		-	0		0	3	24.983.107	15	88.149.870	125%	89,05%	Inspektorat

		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12	12	12	12	3	9.050.000	-	11.050.000	-	0	-	3	20.100.000	15	86.400.000	125%	126,59%	Inspektorat
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan sarana dan prasarana aparatur	56	58	80	5	5	11.560.000	-	44.463.250	-	0	-	26	56.023.250	84	319.697.417	150%	89,41%	Inspektorat
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpenuhinya Kendaraan dinas operasional	22	25	25	3	3	3.500.000	-	38.127.500	-	0	-	3	41.277.500	25	178.279.097	114%	104,62%	Inspektorat
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		3	2	24	-	-	0	-	0	-	0	-	-	0	2	63.744.070	67%	55,41%	Inspektorat

		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor yang dilakukan pemeliharaan rutin	30	30	30	2	2	2.030.000	-	2.450.000	-	0	-	2	4.480.000	32	37.720.500	107%	89,53%	Inspektorat
--	--	--	---	----	----	----	---	---	-----------	---	-----------	---	---	---	---	-----------	----	------------	------	--------	-------------

		Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	jumlah Laporan Evaluasi SAKIP OPD	31	31	31	31	-	1.250.000	-	625.000	-	0	-	1.875.000	31	6.483.000	100,00%	20,90%	Inspektorat
		Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	jumlah LHP yang diterbitkan	134	114	134	28.200.000	-	4.300.000	3.850.000	-	0	-	8.150.000	114	34.975.000	85,07%	124,02%	Inspektorat	
		Reviu Laporan Kinerja	jumlah laporan kinerja yang direviu	44	44	44	28.500.000	-	0	0	-	0	-	0	44	28.500.000	100,00%	100,00%	Inspektorat	
		Reviu Laporan Keuangan	Jumlah reviu laporan keuangan Pemerintah Daerah	1	1	1	18.300.000	-	900.000	4.400.000	-	0	-	5.300.000	1	20.500.000	100,00%	112,02%	Inspektorat	
		Pengawasan Desa	jumlah pengawasan desa yang dilaksanakan	65	58	65	24.108.250	-	0	0	-	0	-	0	58	24.100.000	89,23%	99,97%	Inspektorat	
		Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan AP/IP	Jumlah rekomendasi BPK RI, BPKP, Itjen Kementerian, Itporv, Itkab yang dapat diselesaikan setelah penerbitan laporan	50 5	24 4	505	131.500.000	-	11.200.000	6.600.000	-	0	-	17.800.000	244	119.215.500	48,32%	90,66%	Inspektorat	

Formulir E.81

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota
 Renja Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat
 Periode Pelaksanaan : Januari s/d Mei 2022

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2022 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun...)	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021 (%)		unit Perangkat daerah yang bertanggung Jawab				
								Target Kinerja dan anggaran Renja Perangkat daerah tahun berjalan (2022) yang dievaluasi		I		II		III							IV			
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 + 13/5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase Perumusan kebijakan	100	754.994.850		330.109.000	100	754.994.850	3	14.225.000		13.100.000					3	27.325.000	3	357.434.000	3,00%	47,34%	Inspektorat
		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Persentase perumusan kebijakan teknis	100	41.775.000		28.700.000	100	41.775.000		3.000.000		3.000.000						6.000.000		34.700.000			Inspektorat

		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah hasil koordinasi penyusunan PKPT dan Standar Operasional Prosedur (SOP)	11	41.775.000	11	28.700.000	11	41.775.000	-	3.000.000	-	3.000.000	-	0	-	0	-	6.000.000	11	34.700.000	100,00%	83,06%	Inspektorat
2.02		Pendampingan dan Asistensi	Persentase hasil pendampingan dan asistensi	100	713.219.850	100	301.409.000	100	713.219.850															
		Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Sosialisasi dan jumlah laporan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	17	485.140.033	10	239.370.000	17	485.140.033	-	8.200.000	-	3.850.000	-	0	-	0	-	12.050.000	10	251.420.000	58,82%	51,82%	Inspektorat

Dari Pagu anggaran murni Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 sebesar Rp. 9.522.879.073,- dengan realisasi anggaran sampai dengan bulan Mei 2022 sebesar Rp. 2.594.287.107,- atau capaian realisasi sebesar 27,24 %, dari seluruh program dan kegiatan Inspektorat. Dari hasil evaluasi renja sampai di bulan Mei 2022 tingkat pencapaian belum sesuai dengan target Triwulan.

2.1. ANALISIS KINERJA PELAYANAN INSPEKTORAT KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam membuat kebijakan-kebijakan yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perubahan 2021- 2026 yang didalamnya memuat tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan-kegiatan. Adapun analisis pencapaian kinerja pelayanan Inspektorat sesuai dengan indikator kinerja yang tercantum dalam RENSTRA PERUBAHAN yang mengacu terhadap RPJMD tahun 2021-2026.

Ada beberapa faktor yang merupakan pendorong keberhasilan dan beberapa faktor penghambat/kendala dalam pelaksanaan atau perwujudan indikator sasaran organisasi, yaitu :

a. Faktor Pendorong :

1. Mekanisme kerja Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang berorientasi kepada pencapaian kinerja.
2. Adanya hubungan kerja yang baik dan komitmen yang kuat antara pimpinan dan staf Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam menciptakan suasana kerja yang kondusif sehingga menimbulkan motivasi kerja yang tinggi.
3. Adanya kerjasama yang baik dari perangkat daerah terhadap upaya peningkatan kualitas hasil pengawasan.
4. Pola kerja yang sistemik dan terjadwal sehingga memberikan hasil yang optimal, efektif dan efisien.

b. Faktor Penghambat :

1. Belum memadainya jumlah aparatur pengawasan dibandingkan dengan jumlah objek yang diperiksa.
2. Belum memadainya jumlah aparatur pengawasan yang memiliki sertifikat pengawasan.
3. Belum memadainya kebijakan sistem dan prosedur pengawasan dalam rangka percepatan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme.

4. Sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) yang dilaksanakan Perangkat Daerah masih belum optimal.
5. Belum memadainya sarana dan prasarana pendukung operasional dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan

2.2. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Inspektorat Kabuapten Tanjung Jabung Barat tidak dapat lepas dari isu-isu strategis yang melingkupinya. Isu-isu strategis dimaksud antara lain :

1. Akuntabilitas pengelolaan keuangan wajib menjadi perhatian utama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2. Penerapan sistem akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat secara keseluruhan sudah mulai berjalan dengan baik, walaupun tantangan kedepan terhadap SAKIP Kabupaten Tanjung Jabung Barat masih harus berbenah untuk meningkatkan nilai yang lebih baik.
3. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) belum dapat dilaksanakan dengan optimal dan terkoordinasi dengan mengedepankan peran sebagai *quality assurance* (menjamin kualitas dari suatu instansi) bukan mencari kesalahan.
4. Maturitas Kapabilitas APIP di Tahun 2022 harus sudah mendapat level 3 dengan tetap mengedepankan profesionalisme APIP sebagai *quality assurance* bagi Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat

III

Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan

3.1. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan merupakan pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tujuan tersebut memuat penyusunan dan pelaksanaan strategi yang tepat dalam pencapaian tujuan pelayanan Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, yaitu tahun 2021-2026.

Sedangkan Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu rencana.

Adapun tujuan dan sasaran yang sudah tertuang dalam Renstra Perubahan Inspektorat adalah sebagai berikut :

a. Tujuan

- Meningkatkan Tata Kelola Pengawasan Pemerintah Daerah.
- Terselenggaranya Tata Kelola Perangkat Daerah yang Efektif, Efisien, dan akuntabel.

b. Sasaran

- Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pengawasan.
- Meningkatnya maturitas penyelenggaraan SPIP dan Kapabilitas APIP
- Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Dengan demikian program dan kegiatan pembangunan yang ada pada dokumen perencanaan diatur secara rinci dalam rencana kerja (RENJA) perubahan.

3.2. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RENJA TAHUN 2022

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui pencapaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Perangkat Daerah guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Program

dan Kegiatan Inspektorat yang direncanakan untuk Periode Tahun 2021-2026 meliputi program dan kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perubahan yang mengacu pada Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 - 2026 dalam rangka pencapaian visi dan misi.

Untuk besaran Anggaran pada Program dan kegiatan yang ada pada Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengalami Penambahan Pagu sebesar Rp. 65.565,- sehingga pagu Perubahan Renja menjadi Rp. 12.285.343.416,- Seperti yang terlihat pada tabel berikut ini

Tabel
Rumusan Rencana Kerja Perubahan Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja		KEBUTUHAN ANGGARAN		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Berkurang/ Bertambah
						(Rp)	(Rp)	(Rp)
6.01.01	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		ISP	100%	100%	9.522.879.073	9.322.851.473	
6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		ISP	100%	100%	12.350.000	12.350.000	
6.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	ISP	5 Dokumen	5 Laporan	12.350.000	12.350.000	
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		ISP	12 Bulan	12 Bulan	4.269.311.838	4.274.351.838	
6.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	ISP	12 bulan	45 OB	4.092.311.838	4.092.311.838	
6.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	ISP	12 bulan	12 Dokumen	177.000.000	182.040.000	5.040.000
6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		ISP	100%	100%	206.748.527	314.858.927	108.110.400
6.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	ISP	48 stel	48 Paket	19.200.000	19.200.000	

6.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	ISP	25 org	45 org	187.548.527	295.658.927	108.110.400
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		ISP	100%	100%	3.373.078.108	3.168.038.108	-205.040.000
6.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	ISP	12 Bulan	8 Paket	8.496.163	8.496.163	
6.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	ISP	43 item	43 Paket	94.206.321	94.206.321	
6.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	ISP	12 bulan	3 Paket	38.000.000	38.000.000	
6.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	ISP	12 bulan	13 Paket	23.294.324	23.294.324	
6.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	ISP	12 bulan	2 Dokumen	9.600.000	9.600.000	
6.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	ISP	12 bulan	12 Laporan	3.199.481.300	2.994.441.300	- 205.040.000
6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		ISP	100%	100%	1.073.621.800	795.389.800	- 278.232.000

6.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	ISP	8 unit	6 Unit	781.200.000	240.000.000	- 541.200.000
6.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	ISP	65 unit	82 Unit	292.421.800	555.389.800	262.968.000
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		ISP	100%	100%	169.939.500	169.939.500	
6.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	ISP	12 bulan	12 Laporan	2.700.000	2.700.000	
6.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	ISP	12 bulan	12 Laporan	98.989.500	98.989.500	
6.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	ISP	12 bulan	12 Laporan	68.250.000	68.250.000	
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100%	100%	417.829.300	587.923.300	587.923.299
6.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	ISP	18 Unit	18 Unit	179.455.950	198.881.400	19.425.450
6.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	ISP	3 Unit	4 Unit	166.565.350	256.565.350	90.000.000

6.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	ISP	30 unit	42 Unit	41.820.000	72.704.550	30.884.550
6.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah peralatan kantor yang dilakukan pemeliharaan rutin	ISP	1 gedung	1 Unit	29.988.000	59.772.000	29.784.000
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		ISP	76%	76%	319.052.250	519.052.250	
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal		ISP	163 LHP	193 LHP	155.527.250	355.527.250	200.000.000
6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	ISP	31 LHE	31 Laporan	13.419.000	13.419.000	
6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	ISP	134 LHP	44 Laporan	28.200.000	28.200.000	
6.01.02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	ISP	44 LHR	44 Laporan	10.900.000	210.900.000	200.000.000
6.01.02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	ISP	1 LHR	1 Laporan	13.900.000	13.900.000	
6.01.02.2.01.05	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	ISP	65 LHP	65 Laporan	10.908.250	10.908.250	
6.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	ISP	505 rekomendasi	8 Dokumen	78.200.000	78.200.000	
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		ISP	100%	100%	163.525.000	163.525.000	

6.01.02.2.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	ISP	8 rapat	8 Laporan	51.800.000	51.800.000	
6.01.02.2.02.02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	ISP	20 kasus	20 Laporan	111.725.000	111.725.000	
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		ISP	100%	100%	587.961.778	587.961.778	
6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan		ISP	100%	100%	29.775.000	29.775.000	
6.01.03.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	ISP	11 dokumen	505 Rekomendasi	29.775.000	29.775.000	
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi		ISP	100%	100%	558.186.778	558.186.778	
6.01.03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	ISP	17 laporan	17 Kegiatan	430.694.214	430.694.214	
6.01.03.2.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	ISP	7 dokumen	7 Perangkat Daerah	127.492.564	127.492.564	
						9.522.879.073	9.322.851.473	
						10.429.893.101	10.429.865.501	

3.3. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan merupakan acuan setiap perangkat daerah (PD) dalam mengoperasionalkan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah. Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi suatu instrumen dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah.

Penyusunan RENJA PERUBAHAN berpedoman pada renstra perubahan Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan mengacu pada rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) perubahan. Penyusunan RENJA PERUBAHAN bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD. Rencana Kerja Inspektorat merupakan bagian yang utuh dari rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana strategis (RENSTRA) Inspektorat. Keduanya merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah dan peraturan menteri dalam negeri nomor 28 tahun 2009 tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor 23 tahun 2007 tentang pedoman tata cara pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dengan demikian program dan kegiatan pembangunan yang ada pada dokumen perencanaan diatur secara rinci dalam rencana kerja (RENJA).

V

Penutup

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 merupakan perubahan rencana tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) perubahan Inspektorat Tahun 2021-2026. Renja ini memberikan gambaran mengenai program, kegiatan, sasaran, indikator-indikator kinerja dan target yang akan dilaksanakan dalam anggaran perubahan 2022 sehingga pada akhir tahun pelaksanaan anggaran dapat terukur dan terlaksana sesuai tujuan.

Seluruh program dan kegiatan yang di rencanakan diharapkan akan bisa menutupi seluruh kebutuhan program pengawasan dan sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan RKPD Provinsi Jambi yang di sesuaikan juga dengan pagu anggaran yang di terima Inspektorat.

Dengan demikian besar harapan kami agar alokasi anggaran untuk Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat mendapat prioritas dalam kebijakan pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bagi implementasi program peningkatan pengawasan Akuntabilitas Aparatur Negara sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dalam hal penyelenggaraan pengawasan/audit atas instansi pemerintahan dan aparatur pemerintah, selain itu alokasi anggaran yang di terima akan di prioritaskan untuk meningkatkan kapasitas tenaga pengawas dan pemeriksa agar kualitas pengawasan serta penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan dan pemeriksaan/audit mengalami peningkatan.

Kuala Tungkal, Juni 2022

INSPEKTUR KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Drs. ENCEP JARKASIH

Pembina Utama Muda

NIP. 19701201 199009 1 001